

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Penelitian

Fenomena pelaporan keuangan pemerintah daerah di Indonesia merupakan sesuatu hal yang menarik untuk dikaji lebih lanjut karena Badan Pengawas Keuangan (BPK) setiap tahunnya memberikan penilaian berupa opini terhadap laporan keuangan pemerintah daerah. Ketika laporan keuangan pemerintah daerah mendapatkan Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK, berarti dapat dikatakan bahwa laporan keuangan tersebut disajikan dan diungkapkan secara wajar dan berkualitas. Terdapat empat opini yang diberikan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah, yaitu Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP), Opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP), Opini Tidak Wajar (TW), dan Tidak Memberi Pendapat (TMP) hal ini menurut Yuliani dan Agustini (2015).

Munculnya kasus bahwa laporan keuangan pemerintah daerah Kabupaten Bengkulu Selatan (BS) pada beberapa tahun belakangan gagal mendapat Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). BPK menyatakan opini atas laporan keuangan Pemda BS dengan predikat Wajar Dengan Pengecualian (WDP). Hal ini disebabkan diantaranya karena belum tertatanya aset dengan baik serta ditemukannya ada kelebihan proyek kelebihan bayar yang belum dikembalikan oleh kontraktor. Masalah lain adalah terdapat beberapa aset tetap seperti tanah dan bangunan milik pemerintah daerah yang ditarik Pemprov sebagai dampak karena tidak terawatnya aset-aset tersebut.

Permasalahan aset di lingkungan Pemda Bengkulu Selatan (BS) dari hasil pemeriksaan audit Badan pemeriksa keuangan (BPK) Perwakilan Bengkulu, diketahui juga banyak aset pemerintah daerah yang tidak jelas, bahkan bernilai tinggi (BPK Provinsi Bengkulu, 2017).

Laporan Keuangan Pemerintah Daerah diharapkan mampu menyediakan informasi keuangan secara jujur dan transparan kepada masyarakatnya serta akan menjadi laporan keuangan yang berkualitas. Terdapat beberapa kekayaan milik daerah, salah satunya adalah aset daerah, ada dua jenis aset yaitu aset keuangan dan aset non keuangan. Aset keuangan seperti kas, piutang, serta surat surat berharga. Aset non keuangan salah satunya adalah aset tetap hal ini menurut Febrianti (2016).

Kolinug, dkk (2015) menyatakan bahwa untuk dapat menghasilkan informasi laporan keuangan yang andal salah satunya adalah melalui pengelolaan aset milik daerah, pemerintah daerah harus mengelola aset dengan baik, aset tetap milik daerah merupakan upaya untuk menciptakan nilai tambah, meningkatkan efisiensi dan efektifitas dalam pengelolaan aset serta melalui hal ini dapat mendukung fungsi dan peran pemerintah daerah sebagai penyelenggara pelayanan publik untuk masyarakatnya. Selain itu juga menjadi langkah awal pemerintah daerah melakukan pengembangan kemampuan di bidang keuangan.

Masalah yang ada dalam hal aset daerah salah satunya adalah ketidaktertiban dalam pengelolaan aset. Sebagai dampak dari masalah yang ada pemerintah daerah tidak mengetahui secara pasti jumlah aset yang

dikuasai atau dikelolanya hal ini menurut Antoh (2017). Sehingga menyebabkan masalah di dalam pemerintah daerah. Oleh sebab itu, pemerintah daerah harus melakukan suatu tindakan untuk meningkatkan kualitas laporan keuangan.

Upaya yang dapat dilakukan pemerintah salah satunya adalah melakukan inventarisasi terhadap aset tetap milik daerah, seperti yang dinyatakan Sugiama (2013) inventarisasi aset merupakan kegiatan pendataan, pencatatan, pelaporan, dan dokumentasi dari aset berwujud maupun aset tidak berwujud, Inventarisasi aset dilakukan pada waktu tertentu. Sebuah organisasi perusahaan atau instansi pemerintah perlu melakukan inventarisasi aset untuk mengetahui informasi dari seluruh aset yang dimiliki, dikuasai dan dikelola oleh suatu daerah. Seluruh aset yang dimiliki oleh suatu daerah perlu diinventarisasi baik yang diperoleh dari investasi, hibah ataupun diperoleh dari yang lainnya.

Pengelolaan aset tetap milik daerah tersebut jika dilakukan melalui inventarisasi yang baik juga harus diiringi dengan Sistem Pengendalian Intern (SPI) yang baik juga, maka dari itu di dalam instansi pemerintah sangat diperlukan SPI yang dapat menjadi acuan untuk menjalankan kegiatan di instansi pemerintah khususnya dalam penelitian ini adalah pemerintah daerah. Hal ini sejalan dengan firman Allah SWT dalam QS An-nisa' Ayat 58, yang artinya :

“Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha mendengar lagi Maha melihat”.

Selain Inventarisasi aset tetap dan SPI dalam menjalankan kegiatan didalam pemerintahan, pemerintah daerah harus memiliki sumber daya manusia yang memiliki kompetensi yang baik untuk membantu menghasilkan laporan keuangan yang berkualitas serta yang menjalankan sistem pengendalian intern supaya berjalan dengan baik. Hariandja (2002) dalam Armel (2017) menyatakan sumber daya manusia yang berkompeten diperlukan untuk melaksanakan fungsi, tanggung jawab dan kewenangannya untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan secara efektif dan efisien. Sumber daya manusia yang berkompeten mencakup kapasitasnya, yaitu kemampuan seseorang atau individu, suatu organisasi atau suatu sistem untuk melaksanakan tujuan yang telah ditetapkan.

Jika sudah memiliki sumber daya manusia yang berkompeten, untuk dapat mendukung hal tersebut perlu adanya pemanfaatan teknologi informasi. Penjelasan peraturan pemerintah No. 56 tahun 2005 bahwa pemerintah daerah mempunyai kewajiban untuk membagikan informasi keuangan kepada pelayanan publik yaitu semua masyarakat. Hal ini sejalan dengan prinsip tata kelola pemerintah yang baik, melalui pemanfaatan kemajuan teknologi informasi dalam mendukung pemerintah daerah dalam pengelolaan keuangan.

Penelitian ini merupakan gabungan dari penelitian yang sebelumnya telah dilakukan Purnamawati dan Sujana (2015) dan penelitian yang dilakukan Trisnani, dkk (2017). Perbedaan penelitian yang sebelumnya dilakukan oleh Purnamawati dan Sujana (2015) dengan penelitian ini yaitu adanya penambahan variabel pengelolaan inventarisasi aset tetap. Penelitian yang dilakukan Trisnani, dkk (2017) yang menjadi acuan karena salah satu hal yang paling berpengaruh didalam laporan keuangan adalah aset, selain itu juga studi kasus yang dilakukan di penelitian sebelumnya adalah di kecamatan Buleleng sedangkan penelitian ini studi kasus pada organisasi perangkat daerah Kabupaten Bengkulu Selatan.

Febrianti (2016) menyatakan di lingkungan pemda, para pegawai tidak menganggap faktor inventaris merupakan faktor yang krusial. Faktor inventaris tidak cukup menunjang penyajian kualitas laporan keuangan dikarenakan sudah ada pembukuan yang merinci lebih jelas standar dan prosedur pencatatan. Selain itu, Trisnani, dkk (2017) menyatakan penatausahaan aset tetap berpengaruh signifikan positif terhadap keandalan laporan keuangan artinya semakin baik pelaksanaan penatausahaan aset tetap akan meningkatkan keandalan laporan keuangan. Selain itu, Tangke (2015) menyatakan optimalisasi manajemen aset daerah berupa identifikasi dan inventarisasi nilai dan potensi aset daerah, penerapan sistem informasi manajemen aset daerah, pengawasan dan pengendalian pemanfaatan aset, serta melibatkan berbagai profesi atau keahlian terkait aset daerah maka akan

memberikan pengaruh positif dan signifikan terhadap peningkatan kualitas laporan keuangan pemerintah daerah, dalam hal ini neraca.

Berdasarkan uraian dan penelitian terdahulu yang telah dijelaskan di atas, maka penelitian ini bermaksud melakukan penelitian yang berjudul **“Pengaruh Inventarisasi Aset Tetap Milik Daerah, Sistem Pengendalian Intern, Kompetensi Sumber Daya Manusia dan Pemanfaatan Teknologi Informasi terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah”**.

B. Batasan Masalah Penelitian

Berdasarkan latar belakang yang sudah dijelaskan, maka peneliti akan membatasi permasalahan yang akan diteliti pada penelitian ini. Terdapat beberapa hal yang dapat mempengaruhi kualitas laporan keuangan pemerintah daerah, dalam hal ini terbatas membahas mengenai Pengaruh Pengelolaan Inventarisasi Aset Tetap Milik Daerah, Sistem Pengendalian Intern, Kompetensi Sumber Daya Manusia dan Pemanfaatan Teknologi Informasi terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah. Hal ini dikarenakan keterbatasan waktu serta kemampuan peneliti.

C. Rumusan Masalah Penelitian

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, maka rumusan masalah dalam menjelaskan penelitian ini antara lain :

1. Apakah inventarisasi aset tetap milik daerah berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah?

2. Apakah sistem pengendalian intern berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah?
3. Apakah kompetensi sumber daya manusia berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah?
4. Apakah pemanfaatan teknologi informasi berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah?

D. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah tersebut, tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini yaitu:

1. Untuk mendapatkan bukti empiris pengaruh inventarisasi aset tetap terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah.
2. Untuk mendapatkan bukti empiris pengaruh SPI terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah.
3. Untuk mendapatkan bukti empiris pengaruh kompetensi sumber daya manusia terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah.
4. Untuk mendapatkan bukti empiris pengaruh pemanfaatan teknologi informasi terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah.

E. Manfaat Penelitian

a. Manfaat Teoritis

1. Setelah penelitian dilakukan hasilnya diharapkan dapat memberikan masukan untuk kemajuan dalam pengembangan ilmu ekonomi, khususnya pada bidang akuntansi.
2. Dari penelitian ini diharapkan dapat menjadi acuan bagi penelitian-penelitian selanjutnya yang berhubungan dengan kualitas laporan keuangan pemerintah daerah.

b. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam usaha pengelolaan inventarisasi aset tetap milik daerah, sistem pengendalian intern, kompetensi sumber daya manusia, pemanfaatan teknologi informasi dalam mempengaruhi kualitas laporan keuangan terutama bagi daerah dilokasi penelitian. Penelitian ini juga diharapkan dapat memberikan masukan mengenai tindakan apa yang harus dilakukan oleh Instansi Pemerintah dalam hal ini OPD di Kabupaten Bengkulu Selatan.